

PEMANFAATAN RADIO KOMUNITAS DI MASYARAKAT NELAYAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN PANTAI BERBASIS BUDAYA LOKAL

Kokom Komariah¹, Evi Novianti² & Priyo Subekti³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran

e-mail : ¹kokom.komariah@gmail.com, ²novianti.vi@gmail.com, ³priyo.subekti@gmail.com

***Abstract** , This study is entitled *The Utilization of Community Radio in Fishery Communities in Preserving Coastal Environment of Local-based Culture*. The purpose of this study to determine how the utilization of community radio in fishery communities to preserving the coastal environment and to determine the obstacles for the use of community radio. There descriptive qualitative method used to analyze data. The results showed that the utilization of community radio is to empower people through the introduce the importance of environment preservation among school children i.e. how to keep and preserve the coastal environment, keep the beach clean and introduce coastal ecosystem. In addition, community radio is used to inform and educate as means of post-disaster trauma recovery. The radio program packaging merely like any other radio program but with the emphasis more on education and disaster information, especially around the Southern West Java.*

***Keywords:** community radio, coastal environment, radio programming*

Abstrak, Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai berbasis budaya lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan radio komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan radio komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan teknik analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radio komunitas digunakan untuk pemberdayaan warga melalui pengenalan lingkungan untuk anak sekolah seperti bagaimana menjaga lingkungan pantai, melestarikan pantai, menjaga pantai dari sampah-sampah dan pengenalan ekosistem pantai. Selain itu, radio komunitas digunakan untuk informasi dan edukasi yang berfungsi sebagai sarana pemulihan trauma pasca bencana. Program yang berjalan sejauh ini tidak berbeda dengan umumnya stasiun radio. Kegiatan lebih ditekankan pada edukasi dan informasi kebencanaan, terutama di sekitar Jabar Selatan.

Kata kunci : radio komunitas, lingkungan pantai, program radio

PENDAHULUAN

Karakteristik bagian bumi kepulauan mengakibatkan kondisi yang menjadi ciri khas pada suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang merupakan kawasan rawan bencana alam. Beragam jenis potensi bencana mulai dari gempa bumi, gelombang pasang (tsunami), banjir bandang, erupsi vulkanik, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan berbagai bencana alam lain. Kondisi geografis yang rawan terhadap bencana.

Secara histografis, Indonesia merupakan wilayah langganan gempa bumi dan tsunami. Berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sewaktu-waktu lempeng ini akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya jika terjadi tumbukan antarlempeng tektonik dapat menghasilkan tsunami, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara.

Pasca meletusnya Gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami besar di tahun 1883, setidaknya telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia selama satu abad lebih sejak tahun 1900-hingga sekarang. Kejadian bencana alam telah banyak menelan korban baik berupa, infrastruktur pembangunan, harta benda dan ribuan orang hilang atau meninggal dunia. Gempa tektonik dan Tsunami, 26-12-2004 di Aceh telah menelan korban ribuan orang meninggal. Gempa tektonik tanggal 28-3-2005 yang menghancurkan Pulau Nias. Gempa bumi tanggal 27-5-2006 di Yogyakarta dan gempa tektonik 17-7-2006 di Pangandaran Jawa Barat, gempa di Padang Pariaman, 30-9-2009, Banjir bandang di Manado, Gorontalo, Mataram, dan Bali. Peristiwa jebolnya waduk "Situ Gintung Bogor, 27-3-2009 merupakan

bencana alam yang tidak bisa dihindari (www.tempointeraktif.com, 1/4/2009).

Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya Nangro Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan DI.Yogyakarta bagian Selatan, Jatim bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kalimantan Timur (www.detiknews.com).

Sistem peringatan dini (*early warning system*) merupakan system usaha mengingatkan masyarakat beberapa saat sebelum terjadi bencana, selanjutnya menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengenali bencana secara komprehensif. Sistem peringatan dini bisa disamakan dengan kemampuan masyarakat membaca/literasi akan tanda-tanda bencana dan bahayanya (www.siagabencana.lipi.go.id).

Faktor penting dari manfaat system ini adalah peranan informasi tentang bencana menjadi sangat penting. Masyarakat mesti terus menerus mendapat dan mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang mencerdaskan tentang bencana.

Semua pihak yang terkait dengan manajemen bencana harusnya mempunyai tugas/peranan yang sangat besar dalam meningkatkan literasi masyarakat akan bencana baik ketika bencana belum terjadi (mitigasi), sedang terjadi maupun dalam melakukan pemantauan akan gejala bencana. Selain sistem peringatan dini yang dilakukan oleh institusi-institusi yang terkait tentu perlu kerjasama dari seluruh pihak.

Persoalan rendahnya sistem peringatan dini adalah hal yang sering mengemuka. Hal itu di satu sisi

menyebabkan masyarakat selalu tidak siap menghadapi bencana, padahal sebagian besar wilayah Indonesia adalah daerah bencana. Di sisi lain, masyarakat juga kurang paham akan tanda-tanda bencana dan bahaya yang diakibatkannya.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda kawasan pesisir selatan Jawa pada 17 Juli 2006 lalu telah membuka banyak mata. Bencana tersebut memberikan kesadaran mengenai pentingnya pengetahuan mengenai keadaan lingkungan, alam dan perkembangan cuaca, khususnya oleh warga Pangandaran dan sekitarnya. Karenanya, keberadaan sumber informasi yang bisa dipercaya dan dapat diakses secara luas oleh warga, khususnya warga di pengungsian, menjadi suatu kebutuhan yang krusial (kompas.com).

Saat ini tidak sedikit kawasan pantai dan laut Indonesia yang tercemar oleh sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat membahayakan makhluk hidup di laut serta menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung.

Selain itu, dalam menangkap ikan tidak jarang nelayan menggunakan teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan *trawl* mini dan pukat harimau. Cara-cara menangkap ikan seperti ini dalam jangka pendek memang dapat meningkatkan jumlah tangkapan ikan, tetapi dalam jangka panjang hasil tangkapan nelayan akan terus berkurang. Karena dengan penangkapan seperti itu, ikan-ikan kecil yang belum waktunya ditangkap akan terjaring sehingga siklus pertumbuhan atau kelestarian ikan akan terganggu di wilayah tersebut.

Kondisi ini mendapat perhatian dari Walhi Jabar (Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat) yang berinisiatif menghadirkan Radio Komunitas Suara Pangandaran Darurat Recovery pada frekuensi 107,7 FM. Radio ini memberikan layanan informasi terkait

perkembangan cuaca dan kondisi alam secara luas yang dimulai sejak minggu-minggu pertama pasca bencana gempa dan tsunami Pangandaran.

Rakom (Radio Komunitas) ini terletak di Jalan Kidang Pananjung 121 Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Jangkauan siarannya meliputi wilayah kecamatan Pangandaran dan sekitarnya. Sejak mulai mengudara 10 Agustus 2006 lalu, Rakom telah mengadakan beragam aktivitas baik *on air* maupun *off air*. Diantaranya mensosialisasikan kepada warga sekitar pangandaran tentang bahayanya virus HIV/AIDS yang terselenggara atas kerjasama JRK Jabar, Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) dan juga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Dalam konteks penyelenggaraan media radio di Indonesia landasannya berada pada dua ranah yaitu, pertama landasan hukum untuk basis materialnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sedangkan untuk basis kultural adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tetapi sayangnya kedua landasan hukum ini tidak memberi jaminan yang jelas bagi penyelenggaraan media penyiaran, termasuk radio komunitas.

Undang-undang telekomunikasi menyebutkan “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya” (pasal 1 ayat 1). Sementara penyelenggaraan telekomunikasi mencakup 3 jenis, yaitu: jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus (pasal 7 ayat 1). Dalam penjelasan undang-undang ini jenis 1 dan 2 dianggap sudah jelas, sedang jenis ketiga diperincikan sebagai: “penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika,

siaran televisi, siaran radio, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.”

Selama ini Rakom masih mengandalkan relawan sebagai pengisi informasi. Sumber daya manusia memang salah satu kendala yang dihadapi Rakom. Namun, warga sudah mulai berpartisipasi dengan menyumbang informasi melalui sms ataupun telepon, kemudian disiarkan di radio. Kedepannya, wargalah yang diharapkan lebih aktif.

Pemanfaatan radio komunitas mengemban misi untuk memberikan penyadartahuan tentang perlindungan dan pemanfaatan keaneka ragam hayati secara adil dan lestari, menyebarluaskan informasi dan gagasan dari luar maupun dari dalam komunitas sebagai upaya menumbuhkan kepekaan sosial, memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan hukum bagi masyarakat setempat, memberikan pelayanan informasi dan komunikasi di tingkat komunitas yang adil dan egaliter, mendorong partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan penyiaran serta kegiatan sosial, budaya, politik, hukum dan lingkungan. Selain itu memiliki misi untuk mengelola usaha dengan cara yang terbaik untuk memelihara kesinambungan dan kelangsungan operasional dan menumbuh kembangkan budaya dan kearifan lokal.

Pada penelitian ini rumusan masalah dapat dikemukakan sbb: 1) Bagaimana Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai?; 2) Apa hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai?

Tujuan Penelitian dapat dikemukakan sbb: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai berbasis budaya lokal;

2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai berbasis budaya lokal.

KAJIAN TEORI

Potret Informasi dan kondisi bencana, kajian P.M. Laksono (2007 : 41) dari Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta yang bertajuk, ”Visualisasi Gempa Yogya 27 Mei 2006” dengan pendekatan visualisasi media cetak (surat kabar) mendiskripsikan bahwa, ”betapa pentingnya fungsi media untuk penyebaran informasi bencana gempa bumi (2006) di Yogyakarta”.

Dalam penelitiannya Laksono mevisualisasikan pelayatan massal di seluruh Yogyakarta yang sedang berduka. Siapapun yang masuk Yogyakarta ketika itu akan menyaksikan sesak kedukaan yang terus menggelayut yang seolah-olah tidak mau cepat berlalu seperti biasanya kedukaan pada masyarakat Jawa. Diskripsi yang disajikan secara naratif itu sekaligus memberikan makna dalam ragam bencana apapun “media massa” memiliki kelebihan tertentu untuk diseminasi informasi bencana.

Kajian Barbara Hatley (2007:54) seorang peneliti dari University of Tasmania dengan judul penelitiannya “Theatre and Local Cultural Revital After The 2006 Yogyakarta Earthquake” melihat bahwa dampak gempa bumi Yogyakarta 2006 terhadap para pelaku seni pertunjukan (media tradisional) di Bantul. Karena banyak para seniman yang dianggap sebagai elemen kunci penyebaran informasi lokal untuk membangkitkan kembali masyarakat Bantul banyak kehilangan tempat tinggal, sehingga fungsinya menjadi terganggu.

Dalam kajian Barbara (2007) ini menggambarkan proses bagaimana pertunjukan seni budaya (media tradisional) mendukung semangat komunitas, menganalisis dan

memperlihatkan berbagai bentuk budaya lokal selama terjadi krisis sosial akibat bencana alam. Meski dalam akhir kesimpulan penelitiannya Barbara justru tampak kurang percaya diri dan mempertanyakan “apakah hal tersebut bisa berlanjut ketika kondisi sudah normal kembali dalam bentuk ”*relentless change*” dan pengaruh media global, yang masih harus diperhatikan.

Penelitian Nursyirwan Effendi (2007:93) dari Universitas Andalas, tentang “Bencana : Pengalaman dan Nilai Budaya Orang Minangkabau” lebih melihat bencana alam dari perspektif budaya. Simpulannya mendiskripsikan bahwa, bencana alam merupakan rutinitas masyarakat lokal Indonesia. Bahkan potensi kerusakan akibat bencana alam menurut hasil penelitian ini “dipahami sebagai suatu peristiwa alam yang tidak bisa dihindari.

Penelitian Mita Noveria (2007:116-117) peneliti LIPI Jakarta, yang bertajuk “Bencana Alam Dari Sisi Kependudukan: Penyebab dan Dampaknya” membuahakan diskripsi bahwa, bencana alam tidak bisa terpisahkan dari konteks masyarakat. Karena masyarakat disamping menjadi korban sekaligus menjadi pelaku bencana dan penyebab bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor. Perbedaannya jika bencana geologi tidak dapat diprediksi kejadiannya, tetapi bencana akibat ulah manusia dapat diprediksi sekaligus dihindari. Bencana alam akibat ulah manusia dapat dihindari jika penduduk (masyarakat) mempunyai pemahaman/ pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup disekitar mereka.

Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana, Pendefinisian bencana adalah proses, dan bisa didefinisikan sebagai gangguan serius (*disruption*) terhadap orang dan sistem penghidupan dari sebuah komunitas sosial yang dihasilkan dari kerentanan terhadap satu atau kombinasi beberapa ancaman (*hazards*) yang melibatkan hilangnya kehidupan dan atau harta benda pada skala

yang melampaui kapasitas untuk mengatasinya. (Seifulloh, 2004: 331).

Ragam bencana alam yang dimaksud mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Misalnya bencana alam : gempa tektonik, vulkanik, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, angin puyuh, kebakaran hutan dan berbagai jenis bencana alam lainnya. Masing jenis bencana alam tersebut memiliki karakteristik budaya komunikasi yang beragam

Menurut Susanto (2009:74) , Manajemen bencana adalah sebuah siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Justru saat tidak terjadi bencana merupakan kesempatan untuk menyusun aktivitas manajemen bencana. yang lebih baik. Ditambahkan manajemen bencana adalah suatu proses yang terus menerus di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan mengambil langkah-langkah pemulihan.

Menurut Warfield (tanpa tahun), manajemen bencana mempunyai tujuan: (1) mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan (3) mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung, dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Secara garis besar terdapat empat fase manajemen bencana, yaitu: 1) Fase Mitigasi: upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (*building codes*), analisis kerentanan; pembelajaran publik. 2) Fase *Preparedness*: merencanakan

bagaimana menanggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan; latihan keadaan darurat, sistem peringatan. 3) Fase Respons: upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contoh: pencarian dan pertolongan; tindakan darurat. 4) Fase *Recovery*: mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contoh: perumahan sementara, bantuan keuangan; perawatan kesehatan.

Ke-empat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak terjadi secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut di atas. Fase-fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu.

Dalam tahap kewaspadaan bisa dilakukan oleh pemimpin organisasi, baik pemerintah, pemilik perusahaan atau swasta. Mereka menyusun rencana aksi yang harus dilakukan apabila bencana terjadi. Bentuk kebijakan kewaspadaan menurut A.B. Susanto adalah melakukan antisipasi terjadinya bencana dengan mengadakan pelatihan terhadap petugas medis dalam memberikan pertolongan pertama. Pembangunan dan pelatihan sistem peringatan akan terjadinya bencana dan dikombinasikan dengan tempat tinggal darurat dan rencana evakuasi, penyediaan perlengkapan dan peralatan.

Termasuk juga pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ini bisa dilakukan kepada anak-anak dan remaja di sekolah-sekolah, kepada dewasa dengan pelatihan khusus, juga kepada masyarakat dan pekerja yang bisa terlibat dalam penanganan bencana melalui program ekstensi. Sedang ke masyarakat umum dalam bentuk informasi publik melalui media massa, televisi dan radio (Susanto, 2009 : 79-80).

Sedangkan kebijakan publik pada tata kelola bencana (*disaster governance*) meliputi: 1) Kematian ratusan ribu korban bencana. 2) Jutaan orang rakyat Indonesia terkena dampak bencana serta kehilangan

rumah dan sumber penghidupan, keterjebakan rakyat pada kemiskinan, putusanya pendidikan anak-anak dan lain-lain. 3) Aliran bantuan luar negeri yang masuk dalam bentuk utang maupun hibah, dalam konteks tata pemerintahan, baik secara nasional maupun daerah yang penuh ketimpangan dan bermuara pada korupsi hingga menimbulkan ketakutan para donor untuk bantuan pada bencana berikutnya. Artinya, tata kelola bencana dari yang bersifat alamiah seperti gempa, banjir, tsunami dan masalah kekurangan. Tata kelola diperlukan dalam penguatan kelembagaan dalam rangka menegakkan rencana tata ruang dan rencana bencana serta upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengalami bencana.

Pengurangan risiko bencana, Reduksi resiko bencana didefinisikan sebagai upaya atau ukuran yang dipakai untuk memperkecil kerugian dengan cara meminimalisasi ancaman, reduksi kerentanan, kerapuhan dan mempertinggi coping dan kapasitas yang adaptif baik dalam konteks pra, sewaktu bencana dan pada konteks pasca produksi. Reduksi resiko bencana belum terintegrasi ke dalam agenda pembangunan nasional dan belum dilihat sebagai prasyarat penanggulangan kemiskinan dan prasyarat pembangunan (Saifullah, 2004: 331).

Kerentanan yang dimaksudkan ialah internalitas dalam bentuk kemiskinan atau marginalitas yang berakar pada proses dan sistem pembangunan ekonomi, politik, relasi kekuasaan yang tidak berimbang yang mengkondisikan lahirnya bencana, manakala muncul ancaman dalam bentuk *externalitas* dalam bentuk banjir, gempa bumi, tsunami, vulkanik, *epidemic* ketika bertemu dalam bentuk realitas.

Sementara resiko yang dimaksudkan ialah kemungkinan terjadinya kerugian hilangnya nyawa, orang terluka atau kehilangan harta benda kehancuran ekonomi dan sumber penghidupan yang disebabkan oleh fenomena tertentu. resiko sendiri

bermakna kemungkinan terjadinya sebuah situasi serta kerugian yang diakibatkan olehnya. Resiko menjadi konsep mengenai serangkaian kosekuensi yang ditimbulkan dari situasi tertentu.

Di Indonesia melalui Kepres Nomor 111/2001, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Bakornas PBP di tingkat Nasional, Satkorlak PBP di tingkat Provinsi dan Satlak PBP di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui keberadaan institusi ini dapat dibuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Sistem Peringatan Dini terutama hal-hal yang bersangkutan paut dengan kerangka kerja Sistem Peringatan Dini, misalnya Protap, Juklak, dan Mekanisme Kerja [DKS]. Salah satu isu penting dalam penanganan bencana adalah keberadaan sistem komunikasi bencana, sebagai basis komunikasi kebijakan dan bagian dari diseminasi informasi mengenai bencana.

Pada hakikatnya sistem komunikasi adalah sistem sosial karena komunikasi tidak hanya terjadi sistem sosial, tetapi juga menentukan sifat dan eksistensi sistem sosial itu. Titik temu antara sistem komunikasi dengan sistem sosial terletak fungsi komunikasi sebagai perekat hidup bersama (Arifin, 2011: 25).

Radio Komunitas, Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas, dan disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah "dari, oleh, untuk dan tentang komunitas".

Ada sejumlah perbedaan antara radio komunitas dengan radio swasta, yaitu tata cara pengelolaan dan tujuan pendiriannya. Pengelolaan radio komunitas memperhatikan aspek keterlibatan warga atau komunitas. Tujuan kegiatan penyiaran di radio komunitas melayani kebutuhan informasi warganya sehingga keterlibatan

mereka dalam merumuskan program sangat penting.

Berkaitan dengan penyelenggaraan radio komunitas adalah sebuah proses atau peristiwa sosial dimana para anggota dari sebuah komunitas bergabung bersama-sama untuk merancang, memproduksi, menyiarkan berbagai program. Penekanannya disini adalah pada kepemilikan atas berbagai upaya pembangunan dan upaya-upaya demokratis oleh para anggota komunitas yang bersangkutan melalui penggunaan media, dalam hal ini radio untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam segala aspeknya, radio komunitas merupakan komunikasi yang bersifat partisipatoris atau melibatkan semua pihak dan bukannya program-program yang dibuat oleh orang lain mengenai komunitas tersebut (Fraser dan Estrada, 2001, Stiernstedt, Fredrik, 2008, Wallace, Dickie, 2008).

Radio komunitas, pertama, harus dikelola oleh komunitas, kedua, keberadaannya adalah untuk melayani komunitas tersebut. Radio komunitas menjawab kebutuhan komunitas yang dilayaninya, menyumbang pada pembangunan dengan cara yang progresif yang memihak kepada perubahan sosial. Radio komunitas berjuang untuk mendemokratisasi komunikasi melalui partisipasi komunitas dalam bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan konteks sosial masing-masing (Fraser dan Estrada, 2001, Milan, Stefania, 2008, Wallace, Dickie, 2008).

Hal berbeda terjadi pada radio swasta. Lembaga ini berdiri untuk meraih pendengar sebanyak-banyaknya sehingga aspek rating sangat diperhitungkan sebagai ukuran keberhasilan stasiun radio. Hidup dan matinya radio swasta terletak pada pemasukan iklan sehingga seluruh kreativitas diukur dari segmen pasar yang disasar. Singkat kata, radio komunitas mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut sementara radio swasta diarahkan

kepada segmen pasar (Kavada, Anastasia. 2005, Pinseler, Jan, 2008).

Radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat, acapkali bahasa yang digunakan oleh penyiar mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat. Radio swasta cenderung mengikuti gaya bicara orang kota (Jakarta) supaya terlihat modern dan gaul.

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Radio komunitas merupakan buah dari reformasi politik tahun 1998 yang ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendali media di tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia semakin kuat setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 300 radio komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya telah mengorganisasikan diri kedalam organisasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Jaringan Independen Radio Komunitas (JIRAK CELEBES), Forum Radio Kampus Bandung, dan lain-lain.

Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dideklarasikan pada tahun 2002. Di dalam organisasi JRKI terdapat jaringan radio komunitas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda utama JRKI adalah advokasi terhadap penyiaran komunitas di Indonesia menuju demokratisasi penyiaran.

Radio komunitas sampai saat ini masih menghadapi kesulitan di regulasi. Setelah mendapat pengakuan dari UU Penyiaran tahun 2002, regulasi yang berada di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail soal perizinan atau frekuensi masih belum mendukung perkembangan radio komunitas.

Di Indonesia keberadaan media komunitas diatur dengan tegas dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan

bahwa jasa penyiaran terdiri dari: jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik; Lembaga Penyiaran Swasta; lembaga Penyiaran Komunitas; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Adapun aturan yang diacu saat ini mengenai telekomunikasi adalah UU 36 Tahun 1999. Dalam Undang-undang itu tersurat bahwa yang dapat membangun infrastruktur telekomunikasi hanya operator telekomunikasi yang memperoleh izin dari pemerintah.

Namun, konvergensi pada rakom dengan memanfaatkan internet dalam upaya menyediakan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh informasi seluas-luasnya di desa, memanfaatkan celah dari Pasal 30 dari UU 36/1999, seperti tertulis : “Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf (a), dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan (b) setelah mendapat izin menteri.” Intinya jika penyelenggara jaringan telekomunikasi, seperti: Indosat, XL, Telkomsel dan penyelenggara jasa internet seperti: Speedy, TelkomNet, dan IndosatNet belum dapat memberikan akses internet kecepatan tinggi yang “murah” di daerah tertentu, maka masyarakat dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi khusus.

Dasar hukum lain adalah Kepmen Kominfo No. 2 Tahun 2005 tentang frekuensi 2,4Ghz. Kepmen ini pada intinya: (1) membebaskan izin frekuensi bagi penggunaan frekuensi 2,4Ghz (2) membatasi daya pancar maksimum 100mW atau 20 dBm dan (3) membatasi pancaran dari antenna sebesar 36 dBm (Purbo, 2007: 3-4).

Radio Sebagai Media Massa,

Radio adalah salah satu bentuk dari media massa elektronik selain televisi. Maka dari itu radio juga memiliki ciri-ciri media massa. Ciri khas radio adalah tidak menuntut pendengarnya untuk memiliki kemampuan membaca dan melihat, namun hanya diperlukan kemampuan mendengar.

Beberapa ciri khas atau kelebihan radio antara lain (Effendy, 2002, Cankaya, Ozden, 2008): (1) Radio siaran bersifat langsung; untuk mencapai sasaran pendengarnya, dapat dilakukan tanpa mengalami proses yang rumit. Radio tidak memerlukan waktu yang lama untuk penyebarannya. Selain itu, penyampaian pesan lewat radio lebih efektif, efisien dan langsung dapat disampaikan. (2) Radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan; bagi radio tidak ada masalah dengan jarak dan waktu. Sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang penyiar, pada saat itu juga dapat diterima oleh khalayak. Bagi radio juga tidak ada masalah dengan jarak ruang. Radio mampu mencapai seberapa jauh sasaran yang dituju. (3) Radio siaran memiliki daya tarik; radio memiliki daya tarik pada kata-kata lisan (*spoken words*), musik (*music*), serta efek suara (*sound effect*) yang menjadikan acara radio.

Bila media lain membutuhkan waktu khusus untuk bisa dinikmati, mendengarkan radio dapat dinikmati sambil melakukan hal-hal lainnya. Radio merupakan media yang sangat fleksibel di mana pendengar radio tidak harus berada di depan pesawat radionya.

Menurut (Kasali, 2007) menyebutkan bahwa kebudayaan radio telah mengakar pada masyarakat luas. Masyarakat bawah pun telah terbiasa ditemani radio pada setiap kesempatan, seperti waktu bertani dan menangkap ikan. Potensi masyarakat pendengar radio dewasa ini lebih besar lagi karena sekarang siaran atau stasiun radio berpangkal pada lokasi setempat. Dengan demikian, radio dapat mengacu pada keadaan sosial budaya dan perkembangan

masyarakat yang bersangkutan.

Lingkungan (*environment*) merupakan salah satu faktor penting dalam kesinambungan sebuah sistem. Penekanan terhadap lingkungan (baik internal maupun eksternal) akhir-akhir ini semakin berkembang karena diyakini lingkungan (*environment*) merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam berjalannya sebuah sistem.

Literacy Informasi Bencana.

Dalam pengertian *literacy* ini peranan informasi tentang bencana menjadi sangat penting. Masyarakat mesti terus menerus mendapat informasi yang mencerdaskan tentang bencana. Hal ini juga didukung secara ilmiah. Wilbur Schramm (1977 : 351), pakar komunikasi dari AS misalnya, mengemukakan adanya lima tahap respon masyarakat atas terjadinya situasi krisis (bencana), yaitu: (1) Periode sebelum bencana; (2) Periode deteksi dan komunikasi atas ancaman spesifik; (3) Periode darurat (segera), merupakan respon yang relatif tidak terkendali; (4) Periode respon masyarakat yang sudah terorganisir; dan (5) Periode jangka panjang setelah bencana terjadi, saat mana masyarakat kembali menuju ke titik keseimbangan atas dampak permanen dari bencana dimana masyarakat sudah menyatu didalamnya. Pada setiap tahapan tersebut membutuhkan jenis-jenis komunikasi yang spesifik” .

Semua orang, termasuk masyarakat harusnya waspada dengan semua bentuk bencana yang mengancam mereka. Kewaspadaan ini tergantung dari seberapa banyak dan seberapa berkualitas, kredibel informasi yang dimiliki masyarakat tentang bencana dan sebagainya.

Kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat terhadap sebenarnya akan mengurangi jumlah korban yang jatuh. Akan tetapi, setelah bencana terjadi, baru disadari bahwa masyarakat sangat perlu *literate* terhadap berbagai keadaan bencana sesuai ancaman bahaya dari kondisi alam Indonesia.

Selain itu dalam kondisi bencana orang seringkali merasa panik. Ini juga karena masyarakat kurang mendapatkan informasi sehingga tidak tahu bagaimana menyikapi bencana.

Pada dasarnya *information literacy* adalah sejumlah kemampuan yang dimiliki individu untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan dengan efektif informasi yang dibutuhkannya. Dengan demikian akan ada individu yang kaya dan miskin informasi (*rich information and poor information*). *Rich information* dan *poor information* tidak hanya ditentukan dari berapa banyak informasi yang mereka dapatkan, tetapi juga kualitas informasi yang mereka dapatkan disamping kesempatan yang mereka miliki untuk mengakses informasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami fenomena, didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas, dengan objek masalah masyarakat. Peneliti mengumpulkan data yang berserak, merangkaikannya sehingga membangun suatu gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, dan melaporkan pandangan informan secara terperinci. Keseluruhan langkah-langkah penelitian itu dilakukan dalam *setting* alamiah.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, teknik itu digunakan karena peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitian. Peneliti hanya mengetahui satu sampai dua orang informan, Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, peneliti minta kepada informan pertama

untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan informan.

Dalam penelitian mengenai pemanfaatan radio komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai berbasis budaya lokal di Desa Pangandaran Kabupaten Ciamis, peneliti akan mendatangi tokoh masyarakat untuk diwawancarai mengenai pemanfaatan radio komunitas dan bagaimana daerah tersebut melestarikan lingkungan pantai.

Setelah itu, peneliti akan meminta kepada informan pertama untuk menunjukan siapa informan selanjutnya yang layak sebagai informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus radio komunitas suara pangandaran, penyiar radio komunitas suara pangandaran dan masyarakat pendengar radio komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian. Sekitar tahun 2006 pasca terjadinya tsunami yang melanda Pantai Pangandaran, masyarakat sekitar pantai yang terkena dampak langsung tsunami mangalam kerugian baik materi maupun psikologis, masyarakat trauma akan kemungkinan terjadinya tsunami susulan. Kemudian salah satu LSM yaitu Walhi membuat inisiatif membuat sebuah radio komunitas yang dapat memberikan informasi seputar bencana di lingkungan pantai Pangandaran.

Rakom terselenggara atas inisiatif Walhi Jabar, KPID Jabar dan Jaringan Radio Komunitas Jabar. Dukungan juga didapat dari KONUS (Konservasi Alam Nusantara) dalam bentuk 30 radio transistor yang dibagikan ke posko-posko pengungsi. Antara lain di posko Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih. Selain KONUS, komunitas lain yang juga mendukung adalah PGRI (Persatuan Guru Rewarga Indonesia) di wilayah Ciamis Selatan, Komunitas Majelis Taqlim, Karang Taruna, dan Pusat

Pendidikan Lingkungan Pesisir Pangandaran. Secara kelembagaan mereka menjadi Dewan Penyiaran Komunitas dan juga sebagai pengguna/pemanfaat dan pengisi program radio.

Jika diuraikan pemanfaatan radio komunitas Suara Pangandaran bagi masyarakat meliputi: (1) Pemberdayaan Warga, Keberadaan radio komunitas sebagai saluran komunikasi antar warga telah memberi kesadaran akan pentingnya hak atas informasi. Pola komunikasi dari atas ke bawah yang cenderung mengabaikan aspirasi warga mulai berkurang dengan semakin aktifnya warga masyarakat menyuarkan persoalan di lingkungan sekitarnya. Perlahan tetapi pasti radio komunitas muncul menjadi media penguatan aspirasi warga dan peningkatan ekonomi. (2) Informasi dan Edukasi, Yang menarik, setiap akhir pekan Rakom mengadakan kegiatan berupa belajar bahasa Inggris ke pantai bersama anak-anak sekitar. Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran di Indonesia secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Keberadaan radio komunitas juga menjadi salah satu cara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tujuan Rakom sebagai mediator dan artikulator serta corong bagi suara warga, keterlibatan lokal adalah yang utama. Dadang pun menyatakan harapannya agar radio ini makin memberdayakan warga dan menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik khususnya di daerah bencana tersebut.

Agar program siaran dan pengelolaan manajemen radio komunitas dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota komunitas maka dibentuk

semacam Lembaga Supervisi Penyiaran Komunitas. Anggota-anggota lembaga ini dipilih berdasarkan mekanisme terbuka, mewakili semua unsur dalam komunitas, sedangkan proses pemilihannya dapat disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan setempat (Ghazali, 2002).

Masyarakat desa memiliki corak yang bercirikan adanya iklim paguyuban, cenderung statis, dan homogen. Nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam pemerintahan desa adalah partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan pemerintah desa dan warga, menunjukkan hubungan tersebut membutuhkan adanya sarana yang mampu menjembatani komunikasi antara keduanya.

Dalam konteks Indonesia, peran media massa untuk mendukung pemerintah masih sangat sentral karena mengingat lemahnya *civil society*, maka peran media massa sangat dibutuhkan, dan justru menjadi faktor determinan. Persoalannya media massa mana yang dapat diharapkan menjadi tumpuan untuk menggerakkan warga terhadap program-program yang ditujukan kepada masyarakat.

Persoalannya media komunitas apa yang dipilih maka pilihan yang tepat adalah media radio. Di negara berkembang, hanya radio yang dapat disebut "massa". Tidak ada media lain yang dapat mencapai demikian banyak orang secara efisien untuk tujuan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan. Radio dapat dipakai dengan mudah dan ekonomis, mencapai daerah yang jauh. Pada konteks ini lebih dikenal dengan sebutan rakom. Berdasarkan pandangan di atas seperti halnya di Indonesia, rakom menjadi alternatif untuk berkomunikasi terutama di perdesaan.

Penggunaan radio komunitas adalah suatu piranti komunikasi yang baru dan merupakan sesuatu yang potensial dalam mensukseskan pembangunan desa-kota dan merupakan strategi untuk membantu warga menempatkan komunitas

pada posisi yang lebih baik dalam pembangunan, membantu mata pencaharian dan memberdayakan warga untuk memperbaiki kehidupannya, memberikan dasar kepada komunitas untuk berdiskusi dan membicarakan strategi pembangunan, dan juga bagi pemerintah lokal dapat digunakan untuk menginformasikan kepada warga mengenai program-program baru dalam konteks lokal.

Hambatan. Namun, perkembangan yang pesat ini tidak lantas menjamin radio komunitas bebas dari masalah. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan “surut”nya suatu radio komunitas. Salah satu faktor internal yang penting memengaruhi adalah dasar berdirinya radio komunitas dan kemampuan mengelola sebuah lembaga yang lebih berbasis pada semangat sukarela dan pelayanan masyarakat ketimbang mencari uang.

Kelemahan manajemen menjadi faktor internal lainnya yang banyak menghambat kemajuan radio komunitas. Pasalnya, untuk menjalankan perannya, rakom memerlukan sejumlah orang yang cukup militan – artinya sampai tingkat tertentu mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan dana secara sukarela. Dibutuhkan kesiapan masing-masing anggota komunitas untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kemajuan bersama.

Pembahasan. Mengelola sukarelawan dalam jangka panjang adalah hal yang rumit. Sukarelawan memang bekerja bukan untuk uang, tapi ada hal-hal lain yang dicarinya: mungkin ketrampilan, pengalaman, kesenangan, ketenaran, dan sebagainya. Kalau radio komunitas tidak dapat memberikan hal-hal ini, atau tidak dapat memberi lebih daripada yang sudah dimiliki seorang sukarelawan, maka wajar sukarelawan tersebut hengkang.

Sementara itu faktor-faktor eksternal meliputi akses terhadap peralatan elektronika dan orang-orang

yang memiliki kemampuan terkait, serta beberapa regulasi tentang penyiaran komunitas dan regulasi yang terkait lainnya.

Memang kebanyakan radio komunitas menggunakan pemancar yang dirakit sendiri oleh seseorang yang paham elektronika, bukan yang diproduksi oleh pabrik. Meskipun ini juga membangun kemandirian rakyat dalam hal memproduksi alat-alat komunikasi yang dibutuhkan, namun dapat menimbulkan persoalan belakangan. Pasalnya, kebanyakan orang yang biasa merakit pemancar tidak menyertakan skema/gambar rangkaian elektronika dalam produk yang ia buat. Akibatnya kalau pemancar itu rusak, hanya orang yang merakitnyalah yang dapat memperbaikinya.

Dalam penelitian ini dapat ditemukan beberapa hambatan yang sering ditemui oleh pengelola radio komunitas, antara lain: (1) Keterbatasan frekuensi. Dengan daya pancar sekitar 2,5 – 5 km dan daya maksimal 50 watt dirasa belum ideal. Radio komunitas saat ini hanya diperbolehkan beroperasi pada tiga kanal. Menurut ketentuan Kepmenhub no 15 tahun 2002 dan no 15A tahun 2003 yakni di frekuensi FM 107,7 Mhz; 107,8 Mhz; 107,9 Mhz, dengan jangkauan yang terbatas yaitu power maksimal 50 watt dan jangkauan layanan maksimal 2,5 km. (2) Pendanaan Dana (swadaya, bantuan warga, sponsor, dan hibah). Larangan beriklan yang termuat dalam undang-undang penyiaran menyulitkan radio komunitas untuk bertahan hidup. Dibutuhkan kecerdasan lebih dari pengelola radio komunitas untuk menyiasati hal ini. Mengubah iklan komersial menjadi iklan layanan masyarakat, mungkin salah satunya. (3) Sumber daya manusia (SDM) tidak terlatih. Awak/kru yang dimiliki oleh Rakom terdiri dari berbagai profesi dan berlatar belakang berbeda dan sifatnya sukarela. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik secara teknis dan manajerial

dalam mengelola Rakom merupakan suatu kendala. Jam siaran yang sering berubah-ubah ataupun program siaran yang kurang kreatif membuat rakom sulit bersaing dengan radio swasta.

Peningkatan kapasitas SDM ini menjadi mutlak diperlukan. 4) Minimnya Partisipasi Komunitas. Berkembangnya radio komunitas bak jamur di musim hujan. Yang sangat terlihat jelas adalah banyaknya keinginan dari pihak luar untuk mendorong agar komunitasnya tertarik untuk memiliki radio komunitas. Banyak juga yang kemudian terjebak pada soal "keinginan" untuk mengangkat agendanya sendiri ketimbang memfasilitasi dan mendorong komunitasnya agar dapat mewujudkan radio komunitas.

Ada dua faktor penting yang harus dipenuhi oleh seluruh Rakom, yaitu sejumlah orang yang cukup militan, artinya mereka yang mau meluangkan waktu, tenaga bahkan dana secara sukarela. Selain itu yang lebih penting lagi adalah partisipasi masyarakat dan kuatnya kelembagaan. Seringkali rakom ingin meningkatkan daya pancarnya agar jangkauan pendengarnya lebih jauh. Tetapi yang menjadi masalah, semakin besar daya jangkau maka partisipasi masyarakat semakin longgar. Berbeda dengan jangkauan yang relatif terbatas, maka partisipasi bisa lebih intens, bahkan sampai masyarakat itu sendiri yang memberikan masukan pada program acara di radio.

Dalam penelitian ini radio komunitas yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok masyarakat nelayan biasanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang awalnya didirikan oleh kelompok eksklusif, misalnya kelompok yang memiliki hobi elektronika saja dan kelompok inklusif, misalnya yang sejak awal memang ingin menjadikan rakom sebagai wadah peran serta masyarakat.

Kelompok eksklusif dapat saja berubah menjadi inklusif, dan demikian pula sebaliknya. Namun kalau radio tetap didominasi oleh kelompok eksklusif, dan

tidak berperan apa-apa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, konsekwensinya adalah kesulitan menggaling dukungan dari masyarakat. Misalnya kalau ada alat yang rusak, maka kelompok atau individu itu saja yang merasa harus memperbaiki atau menggantinya. Akibatnya, suatu radio dapat berhenti siaran selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau selamanya, tergantung dari inisiatif individu atau kelompok tadi. Ini berbeda dengan rakom yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagaimanapun landasan awal pendirian sebuah radio komunitas, juga masalah partisipasi tetap menjadi isu penting. Meskipun kebanyakan radio komunitas menyatakan bersandar pada prinsip partisipasi masyarakat, kenyataannya saat ini banyak yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut.

PENUTUP

Simpulan. Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai Pangandaran meliputi pemberdayaan warga, informasi dan edukasi. Hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan antara lain adalah keterbatasan frekuensi. Dengan daya pancar sekitar 2,5 – 5 km dan daya maksimal 50 watt dirasa belum ideal; pendanaan Dana (swadaya, bantuan warga, sponsor, dan hibah); sumber daya manusia (SDM) tidak terlatih, Volunteer/sukarela; minimnya Partisipasi Komunitas

Saran. Keberadaan radio komunitas sebagai saluran komunikasi antar warga telah memberi kesadaran akan pentingnya hak atas informasi. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan tentang radio komunitas yang merupakan tempat masyarakat menyalurkan aspirasi dan kreativitasnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar Arifin (2011) *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008) *Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011) *"Dari Reaktif Menjadi Preventif"*. Siaran Pers. Jakarta: Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas
- Cankaya, Ozden, H. Serhat Guney and M. Emre Koksalan. (2008) Turkish radio broadcasts in The Netherlands: Community Communication or Ethnic Market?. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 86-106)
- Foxwell, Kerrie, Jacqui Ewart, Susan Forde and Michaels Meadows. (2008) Sounds like a whisper: Australian Community Broadcasting hosts a quiet revolution. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 5-23).
- Fraser, C. & Estrada, I. (2001) *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office.
- Gazali, Effendi et all. (2003) *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*. Jakarta, Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- _____, (2002) *Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak, Sebuah Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Gunawan, Ari (2005) *Media dan Penanganan Bencana*. Kompas, 6 Januari 2005.
- Hastho Joko Nur Utomo. 2004. "Strategi Komunikasi Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, Yogyakarta". Dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 3 September-Desember 2004. Halaman 284-296.
- Jahi, Amri (Editor) (1996) *Komunikasi Massa dan Pembangunan Perdesaan di Negara-negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jurriens, Edwin (2003) Radio Komunitas di Indonesia: "New Brechtian Theatre' di Era Reformasi?. Jurnal Antropologi Indonesia 72.
- Kavada, Anastasia. (2005) Exploring the role of the internet in the movement for alternative globalization: The case of the Paris 2003 European Social Forum. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 2 (1), 72-95)
- Kementerian Kominfo (2008) *Menimbang Penanganan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Informasi Publik.
- Kent, Randolph (1994) *Kesiapan Bencana: Program Pelatihan Manajemen Bencana*. Edisi Kedua. New York: UNDP-DHA-Interwork.
- Masduki (2007) *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta, LKIS
- Milan, Stefania. (2008) What makes you happy? Insights into feelings and muses of community radio practitioners. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 25-43).
- Mulyana, Dedi (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2006) *Kendala dan Tantangan Penyebaran Informasi di Indonesia: Suatu Perspektif Sosial-Budaya*. Makalah dalam Seminat ISKI di Jakarta 13 September 2006.
- Nugroho, Riant Dwidjowijoto (2004) *Komunikasi Pemerintahan : Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pinseler, Jan. (2008) The Politic of Talk on German Free Radio Stations. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 67-85)
- Rachmiatie, Atie (2007) *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Saefulloh, Eep Fatah (2006) *Puisi Indah Prosa Buruk: Evaluasi Dua Tahun Kebijakan Pemerintahan SBY-JK*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2002) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Sri Mulatsih (2007) "Kebijakan Pemerintah Pascabencana Gempa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" Jakarta: LIPI.
- Stiernstedt, Fredrik (2008) Book Review of Vinod Pavarala and Kanchan Malik K. : Other Voices: The Struggle for Community Radio in India. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 113-116)
- Sun, Wusan. (2008) Alliance and Tactics among Government, Media Organizations and Journalists: A Description of Public Opinion Supervision in China. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 7 (1), 43-55).
- Susanto, A.B. (2009) *Reputation-Driven : Corporate Social Responsibility*, Erlangga.
- Suprapti. C. Dwi Takariani. (2013) Peluang dan Tantangan Radio Komunitas Di Era Konvergensi. Hal 23 -38
- Tambahak Sinta, 2002. *Radio Komunitas Sebagai Alternatif Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yayasan Tambuhak Sinta Palangkaraya. Web site: <http://www.tambahaksinta.org>.
- Wallace, Dickie. (2008) Reinventing the Wheel vs. Grinding the Same Old Axe : An Ethnographic View of the Students and Community Members at a Massachusetts College Radio Station. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 44-66).
- Wahyuni Pudjiastuti. 2008. "Identifikasi Pelaksanaan Program Komunikasi Kesehatan dengan Konsep Pemasaran Sosial di Kecamatan Pathok Beusi, Kabupaten Sumbang". Dalam Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi, Thesis Volume VII/N0.2 Mei-Agustus 2008. Halaman 363-377